

KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PADA PT SEMEN BOSOWA MAROS

Oleh :

DINAR

P3400209019



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013

KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PADA PT SEMEN BOSOWA MAROS

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Akuntansi

Disusun dan diajukan oleh

DINAR

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS

KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT SEMEN BOSOWA MAROS

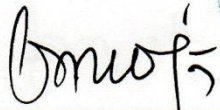
Disusun dan diajukan oleh

DINAR

Nomor Pokok P3400209019

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 28 Januari 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Darwis Said, SE., MSA., Ak.
Ketua



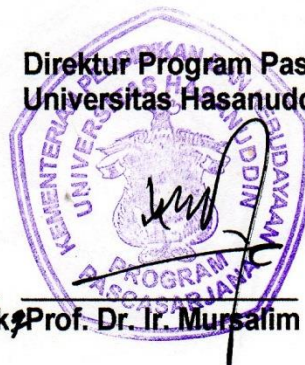
Dr. Tawakkal, SE., M.Si., Ak.
Anggota

**Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi**



Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak.

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,**



Prof. Dr. Ir. Mursafim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dinar

Nomor Mahasiswa : P3400209019

Program Studi : Magister Sains Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2013

Yang menyatakan

Dinar

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas perkenanNya memberikan kesehatan, kesabaran, kelapangan, kekuatan, kesempatan serta ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada program studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama proses penyusunan tesis ini banyak kendala yang peneliti hadapi disamping keterbatasan peneliti sendiri, namun berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak sehingga akhirnya tesis ini dapat dirampungkan. Atas bantuan dan partisipasinya dari berbagai pihak izinkan peneliti menyampaikan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Darwis Said, SE.,MSA.,Ak. selaku Ketua Komisi Penasehat dan Bapak Dr. Tawakkal, SE.,M.Si.,Ak. selaku Anggota Komisi Penasehat yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak.; Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si; Bapak Dr. Syarifuddin, SE.,M.Soc.Sc.Ak. selaku anggota tim penguji, dan Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE.,M.Soc.Sc.Ak. selaku konsultan yang telah memberikan saran-saran dan kritikan yang konstruktif.

3. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak. selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Darwis Said, SE.,MSA.,Ak.; Bapak Dr. Tawakkal, SE, M.Si, Ak.; Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si.; Bapak Dr. Syarifuddin, SE. M.Soc.Sc.Ak.; Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE.,M.Soc,Sc.; Ibu Dr. Hj. Mediati, SE.,M.Si.; Bapak Dr. Alimuddin, SE.,MM,Ak.; Bapak Dr. Yohanis Rura SE.,M.Si.,Ak.; Ibu Dr. Grace T. Pontoh SE.,M.Si.,Ak dan seluruh bapak/ibu Dosen yang tidak sempat saya sebutkan yang telah memberikan ilmu serta bapak/ibu staf administrasi pada Program Magister Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh kuliah sampai selesai.
4. Pengurus Yayasan Pendidikan Fajar Ujungpandang, Rektor Universitas Fajar dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan (izin) kuliah, serta staf dan rekan kerja yang telah memberikan pengertian, bantuan, masukan serta memotivasi peneliti.
5. Pihak PT. Semen Bosowa Maros, Bapak Helmi, Bapak Muchsin, Bapak Andi Nuralang, dan Ibu Suryani serta rekan-rekan beliau yang telah membantu selama proses penelitian.
6. Seluruh rekan-rekan kuliah Program Magister Sains Akuntansi Universitas Hasanuddin angkatan 2009 tanpa terkecuali yang telah berjuang bersama-sama dengan peneliti.
7. Suami tercinta Akmal Hidayat beserta kedua putriku Aqilah Wailah Akmal dan Andini Wailah Akmal, atas pengertian dan kesabarannya berjuang bersama, tak terkecuali Kedua Orangtua, serta segenap keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada peneliti.

8. Semua pihak-pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu peneliti dengan tulus mulai dari proses perkuliahan sampai penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti akan menerima segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi perbaikan tesis ini. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2013

Peneliti

ABSTRAK

DINAR. *Konsep dan Implementasi Akuntansi Corporate Social Responsibility* pada *PT Semen Bosowa Maros*. (Dibimbing oleh Darwis Said dan Tawakkal).

Penelitian ini bertujuan untuk : a) mengetahui konsepsi para pelaku bisnis perusahaan terkait aktivitas *Corporate Social Responsibility* dan akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan, dan b) menawarkan konsep akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan peran akuntansi dalam implementasi CSR.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah paradigma posmodernisme dengan menggunakan teknik analisis dekonstruksi ala Jacques Derrida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) upaya yang dilakukan pihak pelaku bisnis sudah mencerminkan implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkelanjutan (*sustainable*). Sehingga, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, dari segi implementasi aktivitas CSR, PT Semen Bosowa Maros (SBM) telah memahami sebagian besar tujuan dari Program CSR. Namun, dalam hal akuntansi masih menggunakan akuntansi konvensional yang belum mengakomodir penyajian informasi aktivitas CSR, dan 2) Alternatif konsep akuntansi CSR yang dianggap dapat diterapkan oleh PT Semen Bosowa Maros untuk meningkatkan peran akuntansi dalam implementasi CSR yang sesuai dengan aktivitas PT. SBM, adalah memodifikasi konsep akuntansi konvensional sehingga mampu mengakomodir informasi aktivitas-aktivitas CSR. Penelitian ini menyajikan informasi secara seimbang antara aspek sosial, lingkungan dan ekonomi terdiri dari : a) aspek sosial dan lingkungan disajikan dengan menghitung secara rinci biaya-biaya terkait aktivitas dengan menggunakan Bentuk Perhitungan Spesifik terkait masing-masing biaya aktivitas CSR, yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam laporan keuangan dalam Bentuk Perhitungan Laba Rugi Inklusif, dan b) aspek ekonomi disajikan dengan menggunakan Bentuk Perhitungan Distribusi Stakeholder Spesifik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Motivasi Penelitian	9
C. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. <i>Sustainability Development</i> (Pembangunan Berkelanjutan)	12
B. <i>Triple Bottom Line Reporting</i>	12
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
D. Akuntansi CSR	23
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Posmodernisme sebagai Paradigma Penelitian	35
C. Filsafat Jacques Derrida Sebagai Refleksi	
Pembacaan Dekonstruktif	41
D. Lokasi Penelitian	42
E. Data Penelitian	42
F. Pengecekan Validitas Temuan	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV “MENJADI BERKAH” SEBAGAI REFLEKSI CORPORATE	
<i>SOCIAL RESPONSIBILITY PT SEMEN BOSOWA MAROS</i>	50
A. Gambaran Umum Perusahaan	50
B. Gambaran Umum Implementasi CSR	58
4.1.1. Terbentuknya <i>Community Development</i>	58
4.1.2. Visi dan Misi Comdev SBM	61
4.1.3. Implementasi Comdev PT SBM	64
4.1.4. Struktur <i>Community Development</i> PT SBM.....	64
4.1.5. Penerapan Good Corporate Governance pada SBM	68
BAB V MENELUSURI IMPLEMENTASI SBM MENJADI BERKAH	68
A. Realitas Aktivitas CSR SBM	69
B. Realitas Pelaporan dan Akuntansi CSR SBM	79
BAB VI INTERPRETASI ATAS REALITAS AKTIVITAS CSR	
MENUJU KONSEP BERKAH	84
A. Komentar Atas Realitas Aktivitas CSR SBM	84

6.1.1. Kewajiban CSR Bukan Menjadi Tanggungjawab Satu Bagian Atau Divisi Tertentu Saja	85
6.1.2. Hubungan Finansial/Materialitas Bukan Alasan Utama Tanggungjawab Sosial Korporasi.....	89
B. Alternatif Aktivitas CSR Menuju Berkah	92
6.2.1. Jadikan CSR Sebagai Kewajiban Asasi Korporasi	95
6.2.2. Jadikan CSR Sebagai Kebutuhan Hakiki	98
6.2.3. Konsep Berkah bagi Masyarakat, Lingkungan dan para <i>Stakeholder</i> sebagai Refleksi CSR ala SBM	102

BAB VII INTERPRETASI ATAS REALITAS PELAPORAN DAN

AKUNTANSI CSR MENUJU KONSEP <i>SUSTAINABILITY</i>	107
A. Komentar atas realitas pelaporan dan Akuntansi CSR SBM	107
7.1.1. Informasi Internal Terkait CSR Tidak Mencerminkan Realitas Aktivitas CSR Sebenarnya	108
7.1.2. Akuntabilitas CSR ke Pihak Eksternal Tidak Lahir dari Akuntan sebagai Penyedia Informasi	110
B. Alternatif Pelaporan dan Akuntansi Menuju Konsep <i>Sustainability</i>	112
7.2.1. Paradigma Konservatif Akuntan	113
7.2.2. Paradigma Akuntan yang Berbasis <i>Triple Bottom Line</i>	114

BAB VIII DEKONSTRUKSI PARADIGMA AKUNTANSI	119
A. Paradigma Akuntansi Konvensional	119
B. Kelemahan Implementasi Akuntansi Konvensional dalam Mengakomodir Aktivitas CSR	121
C. Alternatif Akuntansi Konvensional yang Mengakomodir Akuntansi CSR	123
8.3.1. Alternatif CSR Menuju Akuntansi <i>Deep Ecology</i>	124
8.3.2. Akuntansi CSR sebagai Modifikasi Akuntansi Konvensional	128
D. Alternatif Model Laporan Laba Rugi yang Mengakomodir Akuntansi CSR	139
8.4.1. Posisi Akuntansi CSR	140
8.4.2. Perhitungan Akuntansi CSR	146
BAB IX PENUTUP	170
A. Kesimpulan	171
B. Saran	173
C. Keterbatasan	175
DAFTAR PUSTAKA	171
Lampiran I	
Lampiran II	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Sustainability Reporting Guidelines GRI</i>	19
Gambar 2.. Alur Sistematisa Penelitian	49
Gambar 3. Alokasi Pendanaan <i>Community Developmen SBM</i>	81
Gambar 4. Keterkaitan Integratif <i>Triple Bottom Line</i>	90
Gambar 5. Rekonstruksi Akuntansi Konvensional Menjadi Akuntansi CSR	125
Gambar 6. Posisi Biaya Terkait CSR Privat dalam Sistem	
Akuntansi CSR	142
Gambar 7. Bentuk Sistem Perhitungan Akuntansi CSR	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Perhitungan Laba Rugi PT. Semen bosowa Maros	83
Tabel 2. Kategori Aktivitas CSR Berdasarkan Skema Item Bersama dan Item Individu	145
Tabel 3. Distribusi Stakeholder	157
Tabel 4. Bentuk Perhitungan Terkait Aktivitas Lingkungan	158
Tabel 5. Contoh Perhitungan Terkait Aktivitas Lingkungan	159
Tabel 6. Contoh Perhitungan Terkait Aktivitas Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia	160
Tabel 7. Contoh Perhitungan Terkait Aktivitas Produk dan Layanan Konsumen	161
Tabel 8. Bentuk Perhitungan Laba Rugi Inklusif	162
Tabel 9. Contoh Perhitungan Laba Rugi Konvensional	163
Tabel 10 Contoh Perhitungan Laba Rugi Inklusif	164
Tabel 11 Bentuk Perhitungan Distribusi Stakeholder Spesifik	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan, dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu penting, yang telah menjadi perdebatan dan banyak menyita perhatian oleh berbagai kalangan. Isu tersebut tidak hanya di tanah air, *Corporate Social Responsibility* juga sudah menjadi isu global yang mendapat perhatian luas dari kalangan pelaku pasar, para kepala negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), lembaga-lembaga keuangan dan bisnis internasional. Munculnya *Global Compact*, *Global Reporting Inisiatives (GRI)*, dan ISO 26000 tentang CSR menunjukkan bahwa CSR menjadi isu krusial serta agenda bisnis global yang harus mendapat perhatian serius dari pelaku bisnis dan dunia usaha.

Di Indonesia sendiri, kewajiban ini dimunculkan lewat Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun masih multi tafsir dan mengandung perdebatan yang serius, tertuang di dalamnya bahwa perseroan yang menjalankan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib bertanggungjawab terhadap masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. CSR yang semestinya diranah sukarela, sejak bulan Juli tahun 2007 diarahkan ke ranah wajib. Dalam hal ini, perusahaan tentu harus menerjemahkan CSR dalam kerangka logis

untuk memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan perusahaan, *stakeholder* dan daya dukung bumi.

Menurut Lako (2007), permasalahan yang kemudian timbul adalah paradigma bisnis dari beberapa pengusaha, pelaku bisnis atau perusahaan di Indonesia masih konservatif dan pragmatis menyebabkan tidak sedikit kalangan pelaku bisnis yang menolak menjalankan CSR. Paradigma yang dimotori Milton Friedman (peraih Hadiah Nobel ekonomi tahun 1976) ini menyatakan : “*There is one and only one social responsibility in business, to use its resources and engage in activities designed to increase its profit*”.

Dalam pandangan Friedman, dengan laba yang maksimal, perusahaan sebagai *the good citizen* bisa menyetor pajak dalam jumlah yang meningkat kepada Negara. Sementara urusan terkait isu-isu sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintahlah yang harus mengalokasikan pajak perusahaan untuk kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan karena hal itu merupakan *the governmental social responsibility* (GSR). Andaikan perusahaan membantu, itu hanya bersifat sukarela.

Selain pandangan Friedman yang dianut, terdapat tiga alasan bagi kalangan pelaku bisnis yang mendasari penolakan untuk implementasi CSR yaitu: (1) praktek CSR umumnya masih bersifat sukarela sehingga aneh bila ini menjadi suatu kewajiban, (2) dengan menjadikan CSR sebagai kewajiban maka dapat membebani perseroan dan mengurangi

laba perseroan untuk pemilik dan pemegang saham yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah deviden yang seharusnya diterima *shareholder*, (3) dapat mengganggu iklim investasi tanah air sehingga para investor bisa lari ke Negara lain (Lako, 2011).

Seiring waktu, implementasi CSR oleh para pelaku bisnis sudah mulai terlihat. Meskipun saat ini tidak lepas dari pemahaman atas tanggung jawab sosial perusahaan, yang umumnya diartikan hanya sebatas *charity*, *philanthropy*, dan *community development*. Parahnya lagi ada yang mengartikan CSR tersebut hanya dibebankan pada bagian atau divisi tertentu. Padahal kenyataannya, kegiatan-kegiatan CSR merupakan suatu keputusan strategis yang melibatkan seluruh sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Saat ini, meskipun para pelaku bisnis sadar akan pentingnya CSR, mereka mengimplementasikan CSR dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Misalnya dengan model *charity* atau pemberdayaan. Perusahaan yang menggunakan model *charity* hanya berfikir bagaimana menghabiskan anggaran dan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu model *charity* mendapat banyak kritikan karena model tersebut hanya menimbulkan rasa ketergantungan oleh masyarakat dan menjadikannya semakin tidak mandiri.

Setelah model *charity* sudah mulai ditinggalkan maka hadirilah model yang dikenal dengan *Community Development* (Com Dev) sebagai pilihan. Model *Community Development* (Com Dev) dianggap mampu

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. PT. Aneka Tambang, misalnya dalam melaksanakan program CSR mendasarkannya pada kebutuhan masyarakat. CSR yang berbasis *Community Development* juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan, yaitu berupa *Good Corporate Governance* (GCG) dan memberikan nilai positif bagi perusahaan di mata publik. Selain itu, CSR diharapkan berguna sebagai sarana dialog antar pelaku bisnis dengan masyarakat sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat. (Rachman,dkk, 2011)

Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya perhatian pelaku bisnis di Indonesia terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sudah meningkat. Sejumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia bahkan sudah “nekat” mengungkapkan informasi CSR-nya dalam pelaporan keuangan. Tren emiten pelapor CSR dan luas pengungkapannya juga terus meningkat. Investor ternyata merespon positif terhadap pengungkapan tersebut (Puspitasari, 2010). Relevansi nilai laporan keuangan dari emiten peduli CSR bahkan jauh lebih besar dibanding emiten yang kurang peduli (Astusi, 2010). Namun, kepedulian pebisnis yang kian meningkat tersebut belum diikuti oleh para akuntan. Meski pebisnis telah berusaha menjadi *green business* sebagai paradigma baru dalam pengelolaan bisnis, namun akuntan masih bersikukuh dengan paradigma akuntansi konservatifnya. Yaitu, tidak mengakui masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari entitas akuntansi sehingga

informasinya tidak disertakan dalam pelaporan keuangan. Akibatnya, akuntansi sering dituding sebagai penyebab terjadinya krisis sosial dan lingkungan karena mengabaikan pelaporan informasi sosial dan lingkungan. Ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah eksternalitas (*externality*). Yaitu, dampak-dampak negative yang ditimbulkan kepada pihak lain, baik yang memiliki relasi bisnis langsung maupun tidak langsung (masyarakat dan lingkungan), dengan perusahaan. Laporan keuangan juga dituding menyesatkan para *stakeholders* dalam pengambilan keputusan karena hanya melaporkan “sinyal-sinyal kesuksesan” keuangan. Sementara informasi CSR atau eksternalitas yang sebenarnya juga merupakan inti dari pelaporan keuangan tidak disertakan. Akibatnya, apa yang menjadi keputusan akhir para *stakeholders* seringkali keliru (Lako, 2011).

Regulasi yang mewajibkan *Corporate Social Responsibility* pun tidak dibarengi dengan penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan dan pelaporannya. Sehingga perusahaan kesulitan dalam menerapkan program CSR dan Akuntansi CSR sebagaimana yang diwajibkan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sendiri sebagai lembaga yang dipandang sebagai penghasil regulasi yang berhubungan dengan standar akuntansi nasional sampai saat ini belum menghasilkan regulasi terkait pelaporan CSR secara teknis. Sehingga dalam implementasinya belum ada standar atau pedoman teknis akuntansi yang berlaku umum untuk Akuntansi CSR.

Disisi lain, tekanan dan tuntutan terhadap perusahaan terkait CSR mendorong lahirnya akuntansi sosial/*social accounting* (Maksum dan Kholis 2003). Menurut Estees (1976:3) "*The term social accounting is defined as the measurement and reporting, internal or external, of information concerning the impact of an entity and its activities on society*". Siegel dan Marconi (1989:499) menyatakan "*social accounting is defined as the ordering, measuring and analytis of the social and economic consequences of governmental and entrepreneurial behavior*". Kalimat di atas jika diterjemahkan secara bebas menyatakan bahwa akuntansi sosial didefinisikan sebagai pengukuran dan pelaporan, internal atau eksternal, atas informasi berkaitan dengan dampak adanya suatu perusahaan beserta aktivitas-aktivitasnya terhadap masyarakat sekitar (Masnila, 2006).

Pada akhirnya, karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis akuntansi CSR yang berlaku umum, pelaporan CSR dalam akuntansi kemudian diimplementasikan dengan berbagai cara dan model yang berbeda, ada yang menyebutnya *Social Accounting* (akuntansi sosial) ada juga yang menyebutnya *Environment Accounting* (akuntansi lingkungan). Dengan harapan bahwa akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan merupakan alat pengukuran, pendokumentasian, dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan berkaitan dengan interaksi suatu organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Demikian pula dengan cara pengungkapannya, beberapa perusahaan

menggunakan media pelaporan sebagai berikut: *Pertama*, melalui media pelaporan keuangan wajib perusahaan (*financial reporting*). Karena belum ada standar akuntansi yang baku maka aktivitas diungkapkan dengan prinsip-prinsip akuntansi konvensional yang ada. *Kedua*, menggunakan media laporan tahunan (*annual report*). Media ini sering digunakan oleh mayoritas perusahaan publik (*go public*) untuk memberi informasi kepada pemegang saham, selain akuntansi konvensional yang digunakan, terkadang penjelasan atas aktivitas disediakan dalam catatan atas laporan keuangan. *Ketiga*, bahkan ada yang membuat dalam bentuk laporan terpisah dari laporan keuangan, laporan dibuat tersendiri, seperti *social and environment reporting*. Selain itu, beberapa perusahaan mengungkapkan seluruh aktivitas CSRnya dalam bentuk laporan kualitatif kepada para *stakeholders*, ada yang menyebutnya *green reporting*, *social performance reporting*, *sustainability reporting*, dan lainnya.

Namun, dari beberapa bentuk pengungkapan di atas, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya, karena akuntan perusahaan masih menganggap laporan CSR sebagai *supplement* (pelengkap) dari laporan keuangan. Sehingga kehadirannya dalam laporan masih bisa dipandang sebelah mata, dengan kata lain, posisi dan keberadaannya tidak jelas. Pengungkapan yang terpisah dalam bentuk kualitatif pun terkadang memberikan informasi yang sifatnya mengarah kepada sinyal-sinyal pencitraan yang menggunakan bahasa yang indah. Sehingga dalam pengambilan keputusan pun, tidak bisa dijadikan acuan

yang tepat untuk menilai kinerja CSR perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Gray (2006) yang menyatakan bahwa, akuntansi dan pelaporan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan selama ini tidak benar-benar berakar dari konsep *sustainability* (keberlanjutan) dan *ecological* (ekologis). Pelaporan dan konsep akuntansi yang ada hanyalah sebagai pelengkap dan legitimator perusahaan, bahwa perusahaan memang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan hanya “baju” dan bukan “hati” perusahaan.

Atas pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan dekonstruksi atas paradigma akuntansi yang diimplementasikan korporasi. Dekonstruksi Derrida mencoba membongkar pandangan tentang pusat, fondasi, prinsip dan dominasi yang mencirikan logosentrisme dan modernitas. Menurut Derrida, logosentrisme sekurang-kurangnya mengandung dua cirri. *Pertama*, prosedur-prosedur yang ada harus diakui sebagai suatu orientasi yang paling umum. *Kedua*, prosedur-prosedur itu harus merupakan suara yang berdaulat yang tidak lagi dapat dipermasalahkan atau diperdebatkan (Hadiwinata, 1994:23). Ciri logosentrisme inilah yang dikritik oleh Derrida karena dianggap memunculkan ketimpangan dalam dunia modern (Santoso,dkk, 2003).

Dekonstruksi dalam penelitian ini dengan membongkar kerangka kerja akuntansi konvensional yang dianggap berlaku umum, kemudian mendesain sebuah kerangka kerja akuntansi yang mengakomodir aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diharapkan mampu mengukur

secara statistik sehingga dapat dibandingkan dan dapat digunakan sebagai alat analisis kronologis untuk menentukan *trend*. Perspektif *Corporate Social Responsibility* bukan lagi pada “pertanggungjawaban” semata, melainkan dapat dijadikan sebagai “strategi manajemen” yang dapat mengurangi resiko CSR. Dengan konsep Akuntansi CSR yang dapat dianalisis secara kronologis, akan memudahkan pengawasan, koreksi oleh pengambil keputusan dan mengambil tindakan atas aktivitas operasi dan terkait aktivitas lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

B. Motivasi Penelitian

Mengingat pentingnya pelaksanaan CSR bagi keberlanjutan perusahaan dan kelangsungan hidup umat manusia serta alam semesta pada umumnya. Maka perlu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari model akuntansi CSR yang tepat sebagai pedoman yang dapat berlaku umum, sehingga apa yang menjadi tujuan mulia dari pelaksanaan program CSR dapat diungkap secara maksimal. Akuntansi CSR sebagai sarana laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan harus mampu menyajikan informasi yang dapat dipahami secara efektif dan efisien oleh para *stakeholders*.

Dengan tujuan pengembangan sistem CSR berbasis sosial yang berkelanjutan, penelitian ini menyajikan gambaran dasar akuntansi CSR dan berfungsi sebagai alat yang memberikan kontribusi terhadap upaya CSR perusahaan dan mendukung penggabungan dan pelaksanaan akuntansi CSR. Meskipun belum ada batasan yang jelas dari konsep

CSR, diharapkan bahwa jika perusahaan dapat mengukur kegiatan CSR, akan mengarah pada pembentukan sistem sosial dimana stakeholder secara akurat dapat memahami, mengevaluasi dan mendukung perusahaan dan kegiatannya.

C. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian adalah bagaimana upaya penciptaan kerangka kerja akuntansi konvensional yang mengakomodir akuntansi *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Dalam hal, bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR sebuah perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi CSR yang dihasilkan dalam bentuk moneter atau numerik diharapkan lebih mudah dipahami sehingga dapat dijadikan alat evaluasi atas pelaksanaan aktivitas CSR perusahaan oleh para *stakeholders*. Sehingga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (SCR) perusahaan? dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan peran akuntansi dalam implementasi CSR?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsepsi para pelaku bisnis perusahaan terkait aktivitas CSR dan akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan.

2. Menawarkan konsep akuntansi CSR untuk meningkatkan peran akuntansi dalam implementasi CSR.

E. Manfaat Penelitian

Ada tiga manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan akuntansi CSR yang berkelanjutan, diharapkan dapat menyajikan informasi yang dapat dianalisis secara kronologis dan dapat melakukan perbandingan antara perusahaan, sehingga dapat menyediakan keterangan dan penjelasan yang lebih jelas terkait aktivitas CSR yang memudahkan pihak-pihak pengambil keputusan untuk melakukan analisis dan pengawasan.
2. Penelitian ini menjelaskan peran akuntansi dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan dalam hal keberlanjutan perusahaan. Jika saat ini perusahaan gagal untuk melakukan operasi dengan memperhatikan CSR, ada kekhawatiran bahwa fenomena yang terkait dengan CSR suatu hari tiba-tiba akan muncul sebagai risiko perusahaan. Maka Akuntansi CSR disediakan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memberi informasi akuntansi yang akan membuktikan manfaat ketika membuat keputusan.
3. Terakhir penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengembangkan akuntansi CSR.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. *Sustainability Development* (Pembangunan Berkelanjutan)

Kata ‘Pembangunan Berkelanjutan’ merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *sustainable development*, yang berarti proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan generasi masa depan” (Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan berkelanjutan adalah inti dari *Corporate Social Responsibility* yang tidak boleh dipahami secara parsial sekadar dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, ataupun *environment* dan *community* saja, tetapi lebih dari itu. Suatu keharusan untuk melihat keterkaitan diantara semua elemen akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan (Rachman dkk, 2011)

F. *Triple Bottom Line Reporting*

Elkington (1977) menyebut sistem pelaporan yang menyertakan informasi CSR sebagai *triple bottom line reporting*, yaitu pelaporan yang menyajikan informasi tentang kinerja ekonomi, (*profit*), lingkungan (*planet*), dan sosial (*people*) dari suatu entitas korporasi. Tujuannya adalah agar *Stakeholder* bisa mendapat informasi yang lebih komprehensif untuk

menilai kinerja, risiko dan prospek bisnis, serta kelangsungan hidup suatu korporasi. Perspektif *triple bottom line business* (Elkington, 2001), basis kekuatan ekonomi (*profit*) korporasi terletak atau ditopang oleh kekuatan sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Secara normatif, semakin kuat kekuatan ekonomi semakin kuat pula kekuatan sosial dan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjelaskan bahwa perusahaan adalah alat bagi manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan intra dan antar generasi dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalau perusahaan masih timpang dalam memenuhinya, maka ia tidak dapat dikatakan telah memenuhi keseimbangan *triple bottom line*, dan kondisi ketimpangan hampir bisa dipastikan akan menghasilkan konflik. Konflik antara perusahaan dan masyarakat luas yang mendambakan keadilan dalam tiga ranah itu dipastikan akan membuat perusahaan dalam kondisi yang berisiko. Dalam kondisi demikian, tidak ada jaminan bahwa perusahaan bisa menjalankan usahanya dalam jangka panjang.

Konsep CSR kemudian menjelaskan apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan dalam menjaga keseimbangan tiga ranah di atas, sementara teori pemangku kepentingan menjelaskan kepada siapa saja perusahaan harus bertanggung jawab. Teori akuntabilitas perusahaan menekankan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak tindakannya serta keharusan menjelaskan dan melaporkan apa yang sudah dilakukan.

G. Corporate Social Responsibility

3.1. Definisi Corporate Social Responsibility

Terdapat beberapa definisi CSR, salah satu yang cukup menarik adalah yang dibuat oleh lingkaran studi CSR Indonesia, yakni “upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Menurut Philip Kotler, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Namun, hal ini bukanlah suatu peraturan yang diharuskan (saat ini di Indonesia telah diharuskan melalui UU Perseroan). Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, CSR bukan sebatas *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan dengan berusaha untuk berguna bagi umat manusia maka dalam jangka panjang tentunya akan tetap eksis.

3.2. Sejarah Singkat CSR

Konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Social Responsibilities of Businessman* karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan “Bapak CSR”. Gema CSR makin bertumbuh kembang di tahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dikenal dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.

Tahun 1998, konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada

kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Pada tahun 2002, *World Summit Sustainable Development* di Johannesburg memunculkan konsep *Social Responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *economic and development sustainability*. Tahun 2010, diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on Social Responsibility*.

3.3. Regulasi CSR

Regulasi yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

3.3.1 Global Compact PBB tahun 2002

Global Compact yang diluncurkan pertama kali oleh mantan Sekjen PBB Kofi Anan pada tahun 2000 merupakan suatu kerangka etik untuk dunia bisnis agar komitmen untuk menyelaraskan strategi dan operasi bisnis mereka dengan sepuluh (10) prinsip yang diterima secara universal dalam bidang HAM (*human right*), buruh atau tenaga kerja (*labour*), lingkungan (*environment*) dan anti korupsi (*anti-corruption*). Tujuannya adalah untuk legitimasi sosial bagi bisnis dan pasar. Hingga akhir Juni 2007, tercatat lebih dari 4.000 korporasi global menjadi anggota Global Compact. Sementara ada sekitar 500 korporasi dikeluarkan dari keanggotaan karena dinilai tidak

menerapkan prinsip-prinsip *Global Compact* secara konsekuen dalam operasi bisnis (*UN Global Compact Annual Review 2007 Leaders Summit*, Juli 2007). Adapun 10 pilar Global Compact BPP sebagai berikut:

I. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

1. Dunia bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang telah diproklamkan secara universal.
2. Memastikan bahwa dunia bisnis tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung pada pelanggaran HAM.

II. Tenaga Kerja (*Labour*)

3. Dunia bisnis harus menjamin kebebasan berserikat dan mengakui hak buruh menyampaikan aspirasi.
4. Menghapus segala bentuk kerja paksa dan pemaksaan lainnya.
5. Menghapus pekerja anak.
6. Mengeliminasi diskriminasi terhadap pekerja dan pekerjaannya.

III. Lingkungan (*Environment*)

7. Dunia bisnis dituntut untuk mendukung suatu pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan.
8. Dunia bisnis mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab melestarikan lingkungan.

9. Mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan.

IV. Anti Korupsi (*Anti-Corruption*)

10. Dunia bisnis harus mencegah segala bentuk korupsi, termasuk ancaman dan penyuapan.

3.3.2 *Global Reporting Initiative (GRI) 2002*

Global Reporting Initiative, sebagai bagian dari program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan pedoman *SR* yang meliputi tiga elemen, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang selanjutnya direvisi pada tahun 2002 (Satyo, 2005).

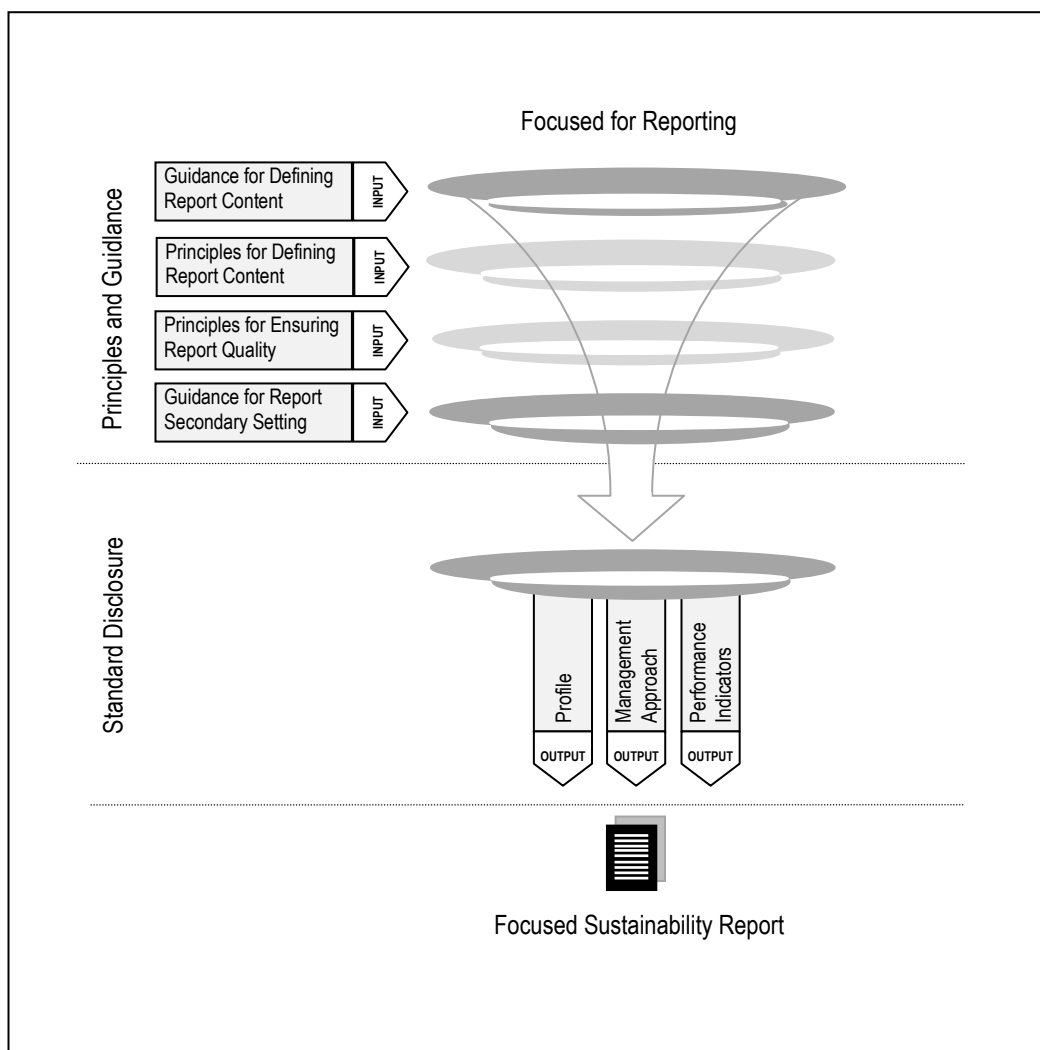
Pedoman *Global Reporting Initiative* 2002 meliputi bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bagian pengantar memberikan informasi mengenai *overview* tentang *sustainability reporting*.
2. Bagian pertama memberikan definisi isi, kualitas, dan batasan laporan.
3. Bagian kedua memberikan petunjuk mengenai standar pengungkapan dalam *SR*. Pengungkapan dalam *SR* meliputi pengungkapan informasi yang relevan dan material mengenai organisasi yang menjadi perhatian berbagai *stakeholder*. Standar pengungkapan meliputi tiga bagian yaitu, sebagai berikut.
 - a. Strategi dan profil perusahaan.
 - b. Pendekatan manajemen.

- c. Indikator kinerja yang meliputi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pedoman pelaporan yang tertuang dalam *Sustainability Reporting GRI 2000—2006* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Sustainability Reporting Guidelines GRI



Sumber : *Overview of GRI Guidelines*

3.3.3 ISO 26000

ISO 26000 adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial atau *social responsibility* (SR). Tanggung jawab organisasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperkatikan ekspektasi pemangku kepentingan; menaati peraturan dan perundangan yang berlaku serta konsisten dengan norma perilaku internasional; dan terintegrasi dalam organisasi dan diimplementasikan pada seluruh aktivitas organisasi tersebut.

Kategori stakeholder dalam perumusan ISO 26000 terbagi atas enam kelompok yaitu pemerintah, kalangan industri, konsumen, lembaga swadaya masyarakat, karyawan, dan akademisi. Bagaimana mengadopsi ISO 26000 dalam strategi perusahaan? Untuk mengadopsinya, perlu ditelaah isu-isu utama dalam ISO 26000. Ada tujuh isu utama dalam merencanakan CSR, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelolah organisasi, (kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil, dan minat stakeholder).
2. Hak asasi manusia, (hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, budaya, dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja).
3. Aktivitas tenaga kerja (pekerja dan hubungan antar-pekerja, kondisi kerja, serta sumber daya manusia).

4. Lingkungan, (preventif polusi, konsumen berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan alam).
5. Aktivitas operasi yang fair, (anti korupsi dan suap, pelibatan tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab sosial melalui rantai nilai pasok, serta perhatian pada HAM).
6. Isu konsumen, (marketing yang fair, praktik perjanjian, perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, privasi dan pengembangan produk dan jasa yang memberi manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen, penyelesaian perselisihan, privasi dan perlindungan data konsumen, akses pada produk dan servis utama, konsumsi berkelanjutan, serta pendidikan dan kepedulian).
7. Kontribusi pada komunitas dan masyarakat, (melibatkan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi, dan kontribusi pada pengembangan sosial).

3.3.4 Regulasi CSR yang diterbitkan di Indonesia

Regulasi mengenai akuntansi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut.

“...Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber

daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan *stakeholder* lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting)”.

PSAK No. 1 belum mengatur dengan tegas, tetapi mengatur pengungkapan dampak lingkungan. Perlakuan akuntansi, dampak lingkungan juga diatur di dalam PSAK No. 32 mengenai Akuntansi Kehutanan dan PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK No. 32 dan 33 semestinya sudah memadai untuk mengatur perlakuan akuntansi lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh pemerintah melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Pasal 17, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal misalnya menyatakan sebagai berikut.

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 menyatakan sebagai berikut.

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, sejak tahun 2005 regulasi Bappepam yang mewajibkan pengungkapan aktivitas CSR dalam laporan tahunan. Dan semua BUMN diwajibkan mengalokasikan 1-3% dari laba bersih untuk membiayai program pengembangan masyarakat dan menyerahkan laporan terpisah yang sudah diaudit.

H. Akuntansi CSR

4.1. Definisi Akuntansi CSR

Akuntansi CSR merupakan suatu paradigma baru dalam bidang akuntansi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Akuntansi ini dikembangkan sebagai respon atas tuntutan dan tantangan yang sedang dihadapi dunia bisnis. Dimana dunia bisnis dituntut tidak hanya bernafsu meraup laba setinggi mungkin tapi juga harus lebih responsive pada isu-isu sosial dan lingkungan yang kian

serius dan kompleks dalam setiap perumusan kebijakan dan tindakan bisnisnya.

Akuntansi CSR (*CSR accounting*) merupakan perluasan dari akuntansi sosial (*Social accounting*) dan akuntansi lingkungan (*Environmental accounting*). Meski berbeda istilah namun esensinya hampir sama.

4.1.1 Akuntansi Sosial

Gray et al. (1987) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai proses pengkomunikasian dampak-dampak sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan untuk kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat. Definisi itu didasarkan pada asumsi bahwa eksistensi suatu perusahaan tidak hanya sekedar menghasilkan laba untuk pemegang sahamnya (*stockholders*). Tapi, juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Menurut Elkington (1977), akuntansi sosial bertujuan menilai dampak-dampak (*effects*) dari suatu korporasi terhadap masyarakat, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dampak itu mencakup relasi komunikasi, kenyamanan produk, aktivitas pelatihan, inisiatif pendidikan, sponsorship, aktivitas amal, donasi uang dan waktu serta mempekerjakan kelompok masyarakat yang tidak beruntung.

Karena itu, ruang lingkup akuntansi sosial mencakup: 1) identifikasi sasaran dan nilai-nilai sosial perusahaan; 2) identifikasi

siapa saja *stakeholder* perusahaan; 3) menentukan indikator untuk mengukur kinerja sosial dan target-target yang ingin dicapai; 4) mengukur kinerja, melakukan pencatatan, dan mempersiapkan akun-akun (*accounts*) dengan menggunakan prinsip kuantitatif seperti relevansi, reliabilitas, *understandability*, objektivitas dan konsistensi; 5) mencatat opini *stakeholder* agar bisa menyajikan *baseline* komparasi di masa depan; 6) menyertakan *accounts* dalam audit independen, dan 7) mempublikasi *accounts* dalam pelaporan keuangan.

4.1.2 Akuntansi Lingkungan

Schaltegger et al. (1996) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai suatu sub area dalam akuntansi yang berhubungan dengan aktivitas, metoda dan sistem pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi lingkungan terkait dengan dampak-dampak finansial dan ekologis dari suatu sistem ekonomi korporasi.

Menurut Gray dan Babbington (2001), ruang lingkup akuntansi lingkungan mencakup: 1) pertanggungjawaban kewajiban dan risiko kontinjen; 2) pertanggungjawab atas revaluasi asset dan proyeksi modal; 3) analisis biaya dalam area penting seperti energi, limbah dan proteksi lingkungan; 4) pengembangan sistem akuntansi dan sistem informasi baru yang melingkupi semua area performa lingkungan; 5) memiliki *costs* dan *benefits* dari program-program lingkungan; 6) pengembangan teknik-teknik akuntansi yang dapat

mengungkap nilai asset, kewajiban dan ekuitas dalam terminologi ekologi.

Bila kedua definisi akuntansi di atas digabung, esensi CSR adalah suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan informasi terkait efek-efek sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi *stakeholder* perusahaan.

Ada dua dimensi utama dalam CSR. *Pertama*, melaporkan dan mengungkapkan *costs* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang secara langsung berdampak pada profitabilitas *bottom-line* (laba). *Costs* dan *benefits* tersebut bisa dihitung dan dikuantifisir secara akuntansi. *Kedua*, melaporkan *costs* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang berdampak langsung pada individu, masyarakat dan lingkungan. *Benefits* itu sulit dikuantifisir sehingga pelaporannya selama ini dilakukan secara kualitatif.

4.2. Teori Akuntansi Konvensional yang Menjelaskan Tentang CSR

Tanggung jawab perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas sebelum pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, sebelum membahas tanggung jawab perusahaan perlu kiranya membahas perusahaan bisnis. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan keberadaan perusahaan, antara lain *concession theory* dan *agency theory*.

Menurut pandangan *concession theory*, pada dasarnya perusahaan eksis karena konsesi atau hak istimewa yang diberikan oleh negara (Deegan, 2004:193). Dengan demikian, perusahaan ada karena negara memberikan hak atau konsesi untuk menjalankan usaha di suatu negara, dampaknya adalah kepentingan individu atau kelompok tertentu berada di bawah kepentingan publik. Hal ini mempengaruhi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik dan kreditor, tetapi juga kepada publik.

Teori kedua yang menjelaskan keberadaan perusahaan adalah *agency theory*. Perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini perusahaan tidak dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini berdampak terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan.

Dalam konteks dekonstruksi CSR teori akuntabilitas korporasi (*corporate accountability theory*) dijadikan sebagai dasar argumentasi. Menurut teori ini, perusahaan harus bertanggungjawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik disengaja maupun tidak disengaja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Secara khusus, teori tersebut menyatakan CSR tidak hanya sekadar aktivitas

kedermawanan (*charity*) atau aktivitas saling mengasahi (*stewardship*) yang bersifat suka rela kepada sesama seperti dipahami para pebisnis selama ini, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu kewajiban asasi yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam sistem serta praktik bisnis. Alasannya, CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya hak asasi yang diberikan Negara kepada perusahaan untuk hidup dan berkembang dalam suatu area lingkungan. Jika tidak ada keselarasan antara hak dan kewajiban asasi perusahaan, dalam area tersebut akan hidup dua pihak, yaitu *gainers* (perusahaan) dan *losers* yaitu masyarakat (Dellaports dkk, 2005).

Selanjutnya dalam hal pelaporan keuangan, salah satu tujuan pelaporan keuangan dalam SFAC No. 1 adalah untuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, selama ini memang belum ada pengaturan yang mewajibkan pelaporannya di Indonesia dan beberapa negara Asia, kecuali di Eropa (Basyit, 2005). Akan tetapi, beberapa teori mendukung dorongan perusahaan untuk melaporkannya kepada publik. Beberapa teori yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* (Deegan, 2004: 292).

Legitimacy theory

Legitimacy theory menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang

diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan.

Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan legitimasi perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar kegiatan operasional perusahaan. Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan.

Pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk mengkomunikasikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

Stakeholder Theory

Stakeholder theory mempertimbangkan berbagai kelompok (*stakeholders*) yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana harapan kelompok *stakeholder* memiliki dampak yang lebih besar (lebih kecil) terhadap strategi perusahaan. Teori ini berimplikasi terhadap kebijakan manajemen dalam mengelola harapan *stakeholder*. *Stakeholder* perusahaan pada dasarnya memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai bagaimana perusahaan dioperasikan. Perusahaan akan berusaha untuk mencapai harapan *stakeholder* yang berkuasa dengan menyampaikan pengungkapan, termasuk pelaporan aktivitas sosial dan lingkungan.

Berdasarkan teori terkait dengan akuntansi sosial dan lingkungan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, akuntansi sosial dan lingkungan menjadi perhatian perusahaan karena perusahaan berusaha memenuhi harapan pihak-pihak terkait dalam upaya mendapatkan legitimasi. *Stakeholder theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan memenuhi harapan *stakeholder* perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk menyampaikan laporan yang menyajikan informasi mengenai upaya perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan yang dikenal selama ini berbentuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *sustainability reporting* (SR). Selain itu,

akuntansi sosial dan lingkungan juga dapat diterapkan dalam bidang akuntansi manajemen dan *auditing*.

Teori-teori lainnya juga menekankan akan pentingnya perusahaan peduli dan melaksanakan CSR secara tepat, sungguh-sungguh, dan konsisten yaitu, *social contract theory* (teori kontrak sosial), *corporate sustainability theory* (teori sustainabilitas korporasi), *political economy theory* (teori politik ekonomi) dan *Justice theory* (teori keadilan).

Social contract theory

Social contract theory menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi *costs* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

Corporate sustainability theory

Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-

generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori sustainabilitas korporasi, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

Political economy theory

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan dimana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik serta juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan CSR.

Justice theory

Menurut teori ini, dalam sistem kapitalis pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antar pihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program CSR.